



RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025

**KECAMATAN CIGALONTANG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohilim
Assalamu'alaikum wr. wb.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunanyang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis yang akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan.



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

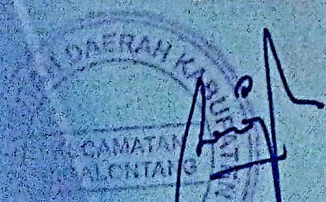
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang. Perencanaan ini dibuat secara parsitipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kecamatan Cigalontang.

Semoga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan capaian kinerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih. Waalaikumsaam wr. wb.

Tasikmalaya, Januari 2025

Camat Cigalontang, Ttd,



DEDI ERNIWAN, S. E.

Pembina Tk. I

NIP. 19681006 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud 10

1.3.2. Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cigalontang 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang 30

2.2.1 Penerapan Reward and Punishment 36

2.2.2 Penerapan Punishment 36

2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Cigalontang 40

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIGALONTANG

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 49

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 49

3.3 Program dan Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG 52

BAB V PENUTUP 79

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Gambar 1.2	Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2024 (Form E.81)
Tabel 2.1.1	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
Tabel 2.1.2	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
Tabel 2.2	Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Tugas Utama Kecamatan Cigalontang Tahun 2025
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Cigalontang
Tabel 4.1	Rencana Target Kinerja Keuangan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
Tabel 4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
Tabel 4.3	Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Cigalontang Tahun 2025
Tabel 4.4	Cascading Kinerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025
Tabel 4.5	Cross Cutting Kinerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana

pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Cigalontang, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cigalontang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cigalontang, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen

Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD,

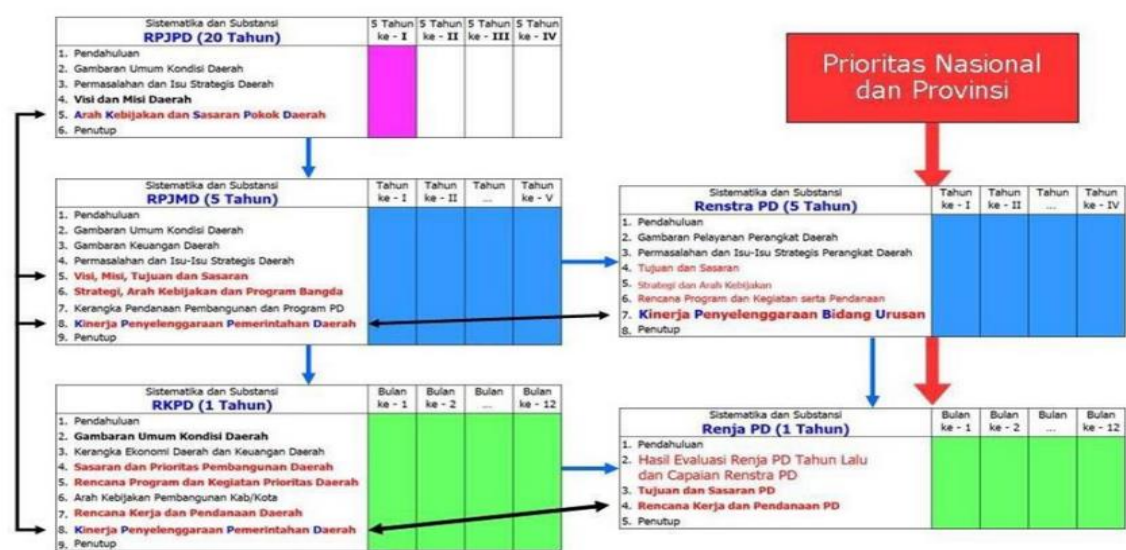
orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

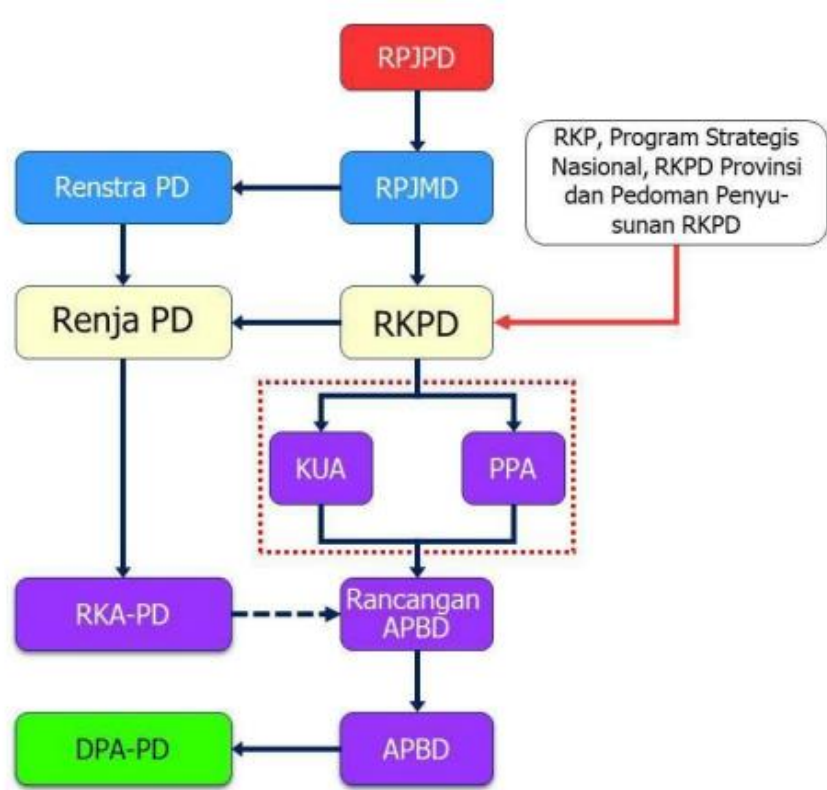
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam awal tahun anggaran. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025, merupakan Rancangan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Cigalontang Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Cigalontang mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cigalontang.

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cigalontang yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Cigalontang dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025 dapat tercapai.

2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tasikmalaya.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Cigalontang Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Cigalontang dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Cigalontang.
4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Cigalontang dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cigalontang
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang
2.2.1.	Penerapan Reward and Punishment
2.2.2.	Penerapan Punishment
2.3.	Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Cigalontang
2.5.	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CIGALONTANG
3.1.	Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG
BAB V	: PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
CIGALONTANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cigalontang

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2024 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 2.515.826.292,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp. 2.507.826.292,00 Belanja Modal Rp. 8.000.000,00 yang terdiri dari 5 (lima) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dari kegiatan tahun 2024 (sampai dengan triwulan IV) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Cigalontang dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dari realisasi fisik sub kegiatan sebanyak 16 (enam belas) yang mencapai fisiknya mencapai 100 %
- B. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan sub kegiatan sebanyak 16 (enam belas) yang pencapaiannya 90,84 %

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun hasil Evaluasi Terhadap Renja selama tahun 2024 sampai dengan triwulan IV sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 Formulir E.81 sesuai dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

Tabel 2.1.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIGALONTANG
TAHUN 2024 (Form E.81)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024		REALISASI TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (11 = 7+8+9+10)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (12 = 11/6*100%)		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
							I		II		III		IV						
					K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	poin	59	1.863.306.292	2235 %	416.481.186	10871 %	452.754.545	8137%	368.387.198	11110 %	409.262.097	88,385	1.646.885.026	88,3851	1.646.885.026	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.656.879.292	2248 %	372.434.436	2466%	408.553.187	7481%	305.618.236	11823 %	361.332.965	87,39	1.447.938.824	87,3895	1.447.938.824	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bln	12	1.656.879.292	2248%	372.434.436	2466%	408.553.187	7481%	305.618.236	11823%	361.332.965	87,39	1.447.938.824	87,3895	1.447.938.824	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	97.685.000	1460%	14.265.050	1745%	17.047.600	18230%	31.078.400	11023%	34.258.350	98,94	96.649.400	98,9399	96.649.400	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	57.233.000	984%	5.631.050	1079%	6.174.600	35435%	21.879.400	10490%	22.952.350	98,959	56.637.400	98,9593	56.637.400	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	8.200.000	3724%	3.054.000	3839%	3.148.000	1013%	319.000	52633%	1.679.000	100	8.200.000	100	8.200.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	9.600.000	1875%	1.800.000	4063%	3.900.000	5128%	2.000.000	9500%	1.900.000	100	9.600.000	100	9.600.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	22.652.000	1669%	3.780.000	1689%	3.825.000	17987%	6.880.000	11231%	7.727.000	98,058	22.212.000	98,0576	22.212.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	22.900.000	2172%	4.973.700	2786%	6.379.258	7712%	4.919.762	7555%	3.717.082	87,292	19.989.802	87,2917	19.989.802	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang isediakan	laporan	12	14.500.000	1361%	1.973.700	2331%	3.379.258	8640%	2.919.762	11361%	3.317.082	79,93	11.589.802	79,9297	11.589.802	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	8.400.000	3571%	3.000.000	3571%	3.000.000	6667%	2.000.000	2000%	400.000	100	8.400.000	100	8.400.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	85.842.000	2890%	24.808.000	2420%	20.774.500	12886%	26.770.800	3718%	9.953.700	95,882	82.307.000	95,882	82.307.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit/tahun	8	75.646.000	2630%	19.893.500	2343%	17.724.000	13960%	24.743.400	4023%	9.953.700	95,596	72.314.600	95,5961	72.314.600	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit/tahun	3	10.196.000	4820%	4.914.500	2992%	3.050.500	6646%	2.027.400	0%	0	98,003	9.992.400	98,0031	9.992.400	

	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Jamanis	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	poin	81,26	336.530.000	410%	13.786.800	421%	14.164.250	89867%	127.289.500	14043%	178.754.150	99,247	333.994.700	99,2466	333.994.700	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan	12	296.000.000	154%	4.553.500	103%	3.062.000	400096%	122.509.500	13466%	164.970.900	99,695	295.095.900	99,6946	295.095.900	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	12	296.000.000	154%	4.553.500	103%	3.062.000	400096%	122.509.500	13466%	164.970.900	99,695	295.095.900	99,6946	295.095.900	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	laporan	12	15.000.000	2986%	4.479.300	1644%	2.465.250	6916%	1.705.000	27749%	4.731.250	89,205	13.380.800	89,2053	13.380.800	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	15.000.000	2986%	4.479.300	1644%	2.465.250	6916%	1.705.000	27749%	4.731.250	89,205	13.380.800	89,2053	13.380.800	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	laporan	12	25.530.000	1862%	4.754.000	3383%	8.637.000	3560%	3.075.000	29437%	9.052.000	99,953	25.518.000	99,953	25.518.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	12	25.530.000	1862%	4.754.000	3383%	8.637.000	3560%	3.075.000	29437%	9.052.000	99,953	25.518.000	99,953	25.518.000	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jamanis	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	254.325.000	1224%	31.130.300	8097%	205.930.900	0%	0	341%	7.028.500	95,976	244.089.700	95,9755	244.089.700	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tida

																			k tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			254.325.000	1224%	31.130.300	8097%	205.930.900	0%	0	341%	7.028.500	95,976	244.089.700	95,9755	244.089.700	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	12	254.325.000	1224%	31.130.300	8097%	205.930.900	0%	0	341%	7.028.500	2,7636	7.028.500	2,76359	244.089.700	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jamanis	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	226%	565.000	337%	843.000	157390%	13268000	7556%	10025000	98,804	24.701.000	98,804	24.701.000	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	226%	565.000	337%	843.000	157390%	13.268.000	7556%	10.025.000	98,804	24.701.000	98,804	24.701.000	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	orang	80	25.000.000	226%	565.000	337%	843.000	157390%	13.268.000	7556%	10.025.000	98,804	24.701.000	98,804	24.701.000	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jamanis	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	36.665.000	4999%	18.327.600	794%	2.911.400	20025%	5.830.000	14719%	8.581.000	97,232	35.650.000	97,2317	35.650.000	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	36.665.000	4999%	18.327.600	794%	2.911.400	20025%	5.830.000	14719%	8.581.000	97,232	35.650.000	97,2317	35.650.000	

		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	doku men	16	17.610.000	0%	0	1653%	2.911.400	20025%	5.830.000	14719%	8.581.000	98,367	17.322.400	98,3668	17.322.400	
		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	doku men	2	19.055.000	9618%	18.327.600	0%	0	0%	0	0%	0	96,183	18.327.600	96,1826	18.327.600	

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kecamatan Cigalontang pada tahun anggaran Perubahan 2024 sebesar Rp. 2.285.320.426,00 atau 90,84 % sedangkan untuk realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 100 % artinya seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan mencapai target.

Berdasarkan tabel 2.1 evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2024 adalah :

- 1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2
Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi
Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di Kecamatan Cigalontang tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
 - Adanya beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan

bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang) pada beberapa obyek sulit di prediksi kebutuhannya (kapan perlu diganti suku cadang). Termasuk juga belanja pemakaian Listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran) , meskipun target fisik bisa tercapai 100%;

- Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.

b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat, penyusunan perencanaan yang baik, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, meningkatnya peran lembaga sosial kemasyarakatan, meningkatnya partisipasi dan swadaya Masyarakat serta terjalinnya sinergitas antar lembaga dalam forkompincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan);
- Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun realisasi target kinerja keuangan Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2

Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.515.826.292	2.285.320.426	90,84
7	01				KECAMATAN	2.515.826.292	2.285.320.426	90,84
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.863.306.292	1.646.885.026	88,39
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.656.879.292	1.447.938.824	87,39
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.656.879.292	1.447.938.824	87,39
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.685.000	96.649.400	98,94
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.233.000	56.637.400	98,96
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.200.000	8.200.000	100,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	9.600.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.652.000	22.212.000	98,06
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.900.000	19.989.802	87,29
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000	11.589.802	79,93
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.400.000	8.400.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.842.000	82.307.000	95,00
1					2	3	4	5

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.646.000	72.314.600	95,60
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.196.000	9.992.400	98,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.530.000	333.993.800	99,25
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.000.000	295.095.900	99,69
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	296.000.000	295.095.900	99,69
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	13.380.800	89,21
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	13.380.800	89,21
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.530.000	25.518.000	99,95
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	25.530.000	25.518.000	99,95
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	254.325.000	244.089.700	95,98
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000	244.089.700	95,98
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	254.325.000	244.089.700	95,98
1					2	3	4	5
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.701.000	98,80
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.701.000	98,80

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.701.000	98,80
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.665.000	35.650.000	97,23
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.665.000	35.650.000	97,23
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	17.610.000	17.322.400	98,37
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.055.000	18.327.600	96,18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cigalontang sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja

berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang			60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	50,5 (C)	50,5 (C) Capaian 2023	N/A	63 (B)	65 (B)	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada penilaian dari Inspektorat,
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang			86,22	86,31	86,39	86,45	81,26	82,53	N/A	86,39	86,45	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,6%
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	25%	25%	25%	N/A	25%	25%	25%	25%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran

4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya disiplin kinerja SDM Aparatur Kecamatan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/ digunakan sebagai penunjang pada kegiatan tersebut kurang memadai.

➤ Rekomendasi :

Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparaturnya dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi secara berkala dengan pihak – pihak lain seperti TNI,Polri dan Masyarakat (RT/RW) agar situasi di lapangan terpantau dan terjaga stabilitasnya.

- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
 - d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 1 indikator yaitu :
- a) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Idealnya dalam setiap pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal serta Prosedur Operasional Standar yang bisa diukur dengan Indikator Kinerja Kunci. Kecamatan Cigalontang

sendiri saat ini telah menerapkan Standar Pelayanan Pemerintah (SPP) melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adanya minimnya aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat membantu serta menunjang tugas pelayanan yang ada di Kecamatan Cigalontang yakni pada masing-masing seksi serta subbag yang ada. Namun secara umum, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan baik dan memenuhi target kinerja yang diharapkan dan tetap menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan semaksimal mungkin di masa mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

2.2.1. Penerapan Reward and Punishment

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Cigalontang) perlu dilakukan *Reward and Punishment* hal ini bertujuan untuk memberikan ransangan motivasi bagi para pegawai yang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat predikat pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.2.2. Penerapan Punishment

Di samping reward juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai tidak hadir tanpa izin.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang

Berdasarkan pada pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja Kecamatan Cigalontang dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang tidak tercapai karena disebabkan karena belum maksimalnya dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerjanya.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang, antara lain :

Sekretariat

- b. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Cigalontang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Cigalontang;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Cigalontang

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :
 - 1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
 - 2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cigalontang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
 - 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
 - 4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Cigalontang tahun 2025 dilalui melalui tahapan berikut :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Cigalontang yang tercantum dalam RKPD 2024 menyesuaikan dengan regulasi baru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2025;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Cigalontang yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Cigalontang yang merupakan program lanjutan dan/atau prioritas sudah tertuang dalam RKPD 2025;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Cigalontang antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Cigalontang berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan Lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Renja Kecamatan Cigalontang tahun 2025 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah

dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan 100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja SKPD. Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

Perangkat Daerah: Kecamatan Cigalontang

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ket
					Program /kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan /Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan		1.877.762.424						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec. Cigalontang	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		1.659.810.324						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cigalontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.659.810.324						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Cigalontang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		108.460.000						
7	01	01	2.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cigalontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	68.000.000						

7	01	01	2.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cigalontang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	8.200.000						
7	01	01	2.0	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	9.600.000						
7	01	01	2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	22.660.000						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Cigalontang	Persentase pemenuhan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		22.900.000						
7	01	01	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	14.500.000						
7	01	01	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	8.400.000						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Cigalontang	Persentase pemenuhan layanan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86.592.100						

7	01	01	2.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cigalontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	75.646.000						
7	01	01	2.0	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cigalontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.946.100						
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		305.530.000						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		265.000.000						
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cigalontang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 Laporan	265.000.000						

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		15.000.000						
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	15.000.000						
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		25.530.000						
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 Laporan	25.530.000						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		304.325.000						

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		304.325.000						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cigalontang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	304.325.000						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		25.000.000						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Cigalontang	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		25.000.000						
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Kec. Cigalontang	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar	12 orang	25.000.000						

					1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		36.665.000						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Cigalontang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.665.000						
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kec. Cigalontang	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 Dokumen	17.610.000						
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cigalontang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	19.055.000						
									2.549.282.424						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dibahas dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Masyarakat atau pemangku jabatan kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Cigalontang kabupaten Tasikmalaya dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tugas Utama
Kecamatan Cigalontang
Tahun 2025

N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan	1.877.762.424	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	305.530.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	304.325.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Cigalontang	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	36.665.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam pelaksanaan penyusunan Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 tetap berjalan sesuai yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak bersifat program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai SKPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan disamping melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Cigalontang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kecamatan Cigalontang diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cigalontang
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan
3. Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Cigalontang

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanisme yang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Cigalontang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Cigalontang.

Program dan Kegiatan pada Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 tertuang di dalam lampiran renja ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program dan kegiatan renja SKPD Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 kami sajikan dalam tabel lampiran renja ini.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Cigalontang. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA
KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN CIGALONTANG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cigalontang	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang		63 (C)
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cigalontang	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang minimal baik		86,39 (B)
		3 Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigalontang	- Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		100%
			- Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100%
			- Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG

Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada di Kecamatan Cigalontang baik sekretariat maupun seksi-seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Tabel. 4.1
Rencana Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.173.126.357	2.173.126.357	100%
7	1				KECAMATAN	2.173.126.357	2.173.126.357	100%
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.805.801.357	1.805.801.357	100%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.619.359.357	1.619.359.357	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.619.359.357	1.619.359.357	100%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.700.000	77.700.000	100%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	37.000.000	100%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.200.000	8.200.000	100%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	9.600.000	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.660.000	22.660.000	100%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.900.000	22.900.000	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000	14.500.000	100%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.400.000	8.400.000	100%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.842.000	85.842.000	100%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.646.000	75.646.000	100%
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.196.000	10.196.000	100%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.530.000	65.530.000	100%
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	25.000.000	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100%
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.530.000	25.530.000	100%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	25.530.000	25.530.000	100%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	254.325.000	254.325.000	100%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000	254.325.000	100%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	254.325.000	254.325.000	100%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.665.000	36.665.000	100%
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	17.610.000	17.610.000	100%
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.100.000	5.100.000	100%

Tabel 4. 2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realisa si Capaia n RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Targ et 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas				Targe t		Pagu Indikat if (Rp)	
															Nasion al	Daer ah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Kecamatan Cigalontang						2.549.282.424,00		2.549.285.556,40								
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.549.282.424,00							2.549.285.556,40			
	7	01				KECAMATAN						2.549.282.424,00							2.549.285.556,40			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	-	-			-	1.877.762.424,00						-	1.877.765.556,40			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.659.810.324,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	1.659.810.324,00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.659.810.324,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng,	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		1.659.810.324,00	Kecamat an Cigalonta ng		

												Semua Kel/Desa							
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.460.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	108.460.000,40
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	68.000.000,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		68.000.000,40	Kecamat an Cigalonta ng
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	8.200.000,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		8.200.000,00	Kecamat an Cigalonta ng
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	9.600.000,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan	-		9.600.000,00	Kecamat an Cigalonta ng

												Semua Kel/Desa							
	7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	86.592.100,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	86.595.232,00	
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	75.646.000,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		75.646.000,00	Kecamat an Cigalonta ng
	7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi				10 Unit	10.946.100,00	Kab. Tasikmala ya, Cigalonta ng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		10.949.232,00	Kecamat an Cigalonta ng
2	7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	305.530.000,00						-	305.530.000,00	
	7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	265.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	265.000.000,00	

	7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	265.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		265.000.000,00	Kecamatan Cigalontang
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	15.000.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	Kecamatan Cigalontang
	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	25.530.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	25.530.000,00	
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13 Laporan	25.530.000,00	Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		25.530.000,00	Kecamatan Cigalontang

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	Kecamatan Cigalontang
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	36.665.000,00						-	36.665.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	36.665.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-	-	36.665.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa													

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	17.610.000,00	Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		17.610.000,00	Kecamatan Cigalontang
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	19.055.000,00	Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	-		19.055.000,00	Kecamatan Cigalontang
										JUMLAH	2.549.282.42							2.549.282.42	

Dalam menyusun rencana kerja perlu juga disusun Rencana Aksi, Cascading serta Cross cutting kinerja untuk mensinkronisasikan antara visi, misi, tujuan serta sasaran strategis dalam pemerintahan Kecamatan Cigalontang.

a. Rencana Aksi

Rencana Aksi yang dimaksud adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dalam satu tahun. Rencana aksi ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Cigalontang.

Rencana aksi kinerja Kecamatan Cigalontang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Per Triwulan, Program, Kegiatan dan Anggaran. Rencana Aksi ini sangat penting karena dapat membantu dalam merencanakan

pencapaian target, memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

Rencana aksi kinerja Kecamatan Cigalontang sebagaimana pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel. 4.3
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
									Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	63 (C)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.877.762.424,00	SEKRETARIAT												

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan cigalontang	13 Orang/bulan	Menginput mutasi gaji dan tunjangan pegawai, cetak gaji pegawai dan tunjangan dan pengajuan gaji dan tunjangan pegawai	1.659.810.324,00	Kasubag PK													
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Kecamatan cigalontang)	12 paket/12 bulan	pembelian dan pemesanan peralatan dan perlengkapan kantor	68.000.000,00	Kasubag Umpeg													
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Kecamatan cigalontang)	13 paket/12 bulan	Pembelian dan Pemesanan Bahan Cetakan dan Penggandaan	8.200.000,00	Kasubag Umpeg													
				Terfasilitasinya kunjungan tamu (Kecamatan cigalontang)	10 laporan	Memberikan fasilitas kunjungan tamu	9.600.000,00	Kasubag Umpeg													

			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kecamatan cigalontang)	13 laporan	membuat surat undangan rapat koordinasi dan konsultasi	22.660.000	Kasubag Umpeg												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kecamatan cigalontang)	13 laporan	penggunaan jasa, penerimaan tagihan jasa dan proses pengajuan	14.500.000,00	Kasubag Umpeg												
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (Kecamatan cigalontang)	13 laporan	pembayaran jasa piket/keamanan	8.400.000,00	Kasubag Umpeg												
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Kecamatan cigalontang)	8 unit	pengecekan kendaraan, service kendaraan dan pembayaran STNK	75.646.000,00	Kasubag Umpeg												
			Terpelihara/terehabilitasinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Kecamatan cigalontang)	3 unit	pengecekan gedung kantor dan pemeliharaan gedung kantor	10.946.100,00	Kasubag Umpeg												

Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,39 (BAIK)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				305.530.000,00	KEPALA SEKSI											
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Terjalinnya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	265.000.000,00	<i>Kasi Pemerintahan</i>											
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah (Kecamatan cigalontang)	13 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	15.000.000	<i>Kasi Pemerintahan</i>											

			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Terlaksananya Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaa n kegiatan dan evaluasi kegiatan	25.530.000, 00	<i>Kasi Pemerinta han</i>											
Meningkatn ya Kondusifitas Wilayah Kecamatan cigalontang	Persentas e Gangguan Ketentera man dan Ketertiban Umum yang ditindakla njudi	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM				304.325.000 ,00	KEPALA SEKSI											
			<i>Koodinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Terjalinnya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kecamatan cigalontang)	12 laporan	rapat koordinasi, pelaksanaa n kegiatan dan evaluasi kegiatan	304.325.000 ,00	<i>Kasi Kesejahter aan Sosial</i>											
Meningkatn ya Kondusifitas Wilayah Kecamatan	Persentas e Potensi Konflik yang tertangani	100%	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM				25.000.000	KEPALA SEKSI											

cigalontang			<i>Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan cigalontang)	12 orang	rapat koordinasi, pelaksanaa n kegiatan dan evaluasi kegiatan	25.000.000	<i>Kasi Ketentram an dan Ketertiban Umum</i>											
Meningkatn ya Kondusifitas Wilayah Kecamatan cigalontang	Persentas e Desa Tertib Administr asi Sesuai Peraturan	100%	PROGRAM PEMBINAAN DA PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA				36.665.000	KEPALA SEKSI											

Perundang-undangan		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Kecamatan cigalontang)	2 laporan (16 desa)	pembuatan jadwal dan tim money, pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, evaluasi kegiatan	17.610.000	Kasi Pemerintahan											
			Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (Kecamatan cigalontang)	2 laporan (16 desa)	rapat koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan	19.055.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan											

a. Cascading

Dalam menyusun rencana kerja Kecamatan Cigalontang maka cascading sangat diperlukan untuk menyelaraskan target kinerja secara vertikal , dimana cascading ini adalah proses penjabaran target kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Komponen-komponen utama rencana kerja cascading adalah visi dan misi, tujuan strategis, sasaran dan indikator kinerja, aktivitas dan tanggung jawab.

Cascading kinerja Kecamatan Cigalontang digunakan untuk menyusun strategi pencapaian hasil kerja, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

Cascading kinerja Kecamatan Cigalontang sebagaimana pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel. 4.4

CASCADING KINERJA

KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2025

CAMAT CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA	
SASARAN STRATEGIS	
SS.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Cigalontang
SS.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cigalontang
SS.3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigalontang
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
IKU.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang
IKU.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan Cigalontang minimal baik
IKU.3.a	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
IKU.3.b	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
IKU.3.c	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	
S.1	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
S.2	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah tercukupi sepanjang tahun
S.3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berhasil terfasilitasi secara rutin
S.4	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di rawat dengan baik
S.5	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
S.6	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	
IKI 1.	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah
IKI 2.	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah tercukupi sepanjang tahun
IKI 3.	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah berhasil terfasilitasi secara rutin

IKI 4.	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di rawat dengan baik		
IKI 5.	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
IKI 6.	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
PROGRAM			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
KEGIATAN			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	1.559.810.324
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	77.460.000
3	penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	22.900.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	85.842.000

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
SASARAN		
S1.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sepanjang tahun	
S2.	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sepanjang tahun	
S3.	Terfasilitasinya kunjungan tamu sepanjang tahun	
S4.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sepanjang tahun	
S5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
S6.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor secara rutin	
S7.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara rutin	
S8.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	
S9.	terpenuhinya laporan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IK1 1.	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sepanjang tahun	
IK1 2.	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan pengadaan sepanjang tahun	
IK1 3.	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sepanjang tahun	
IK1 4.	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sepanjang tahun	
IK1 5.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
IK1 6.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
IK1 7.	Jumlah laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
IK1 8.	Jumlah laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
IK1 9.	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
SUB KEGIATAN		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000

SUB BAGIAN PK		
SASARAN		
S1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	
S2.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
S3.	Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
S4.	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
IKI 2.	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
IKI 3.	jumlah laporan hasil koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
IKI 4.	jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	
SUB KEGIATAN		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.810.324

2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.200.000
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.660.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.400.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.646.000
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.196.000

KASI PEMERINTAHAN	
SASARAN	
S 1.	Tercapainya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait
S 2.	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
S 3.	Tercapainya urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha
S 4.	Tercapainya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam hal fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	
IKI 1.	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah instansi vertikal terkait
IKI 2.	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah kecamatan
IKI 3.	Jumlah laporan urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	
S 2.	tercapainya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan terfasilitasinya pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	
IKI 2.	Jumlah laporan terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	
KEGIATAN		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.055.000

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
KEGIATAN		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	254.325.000

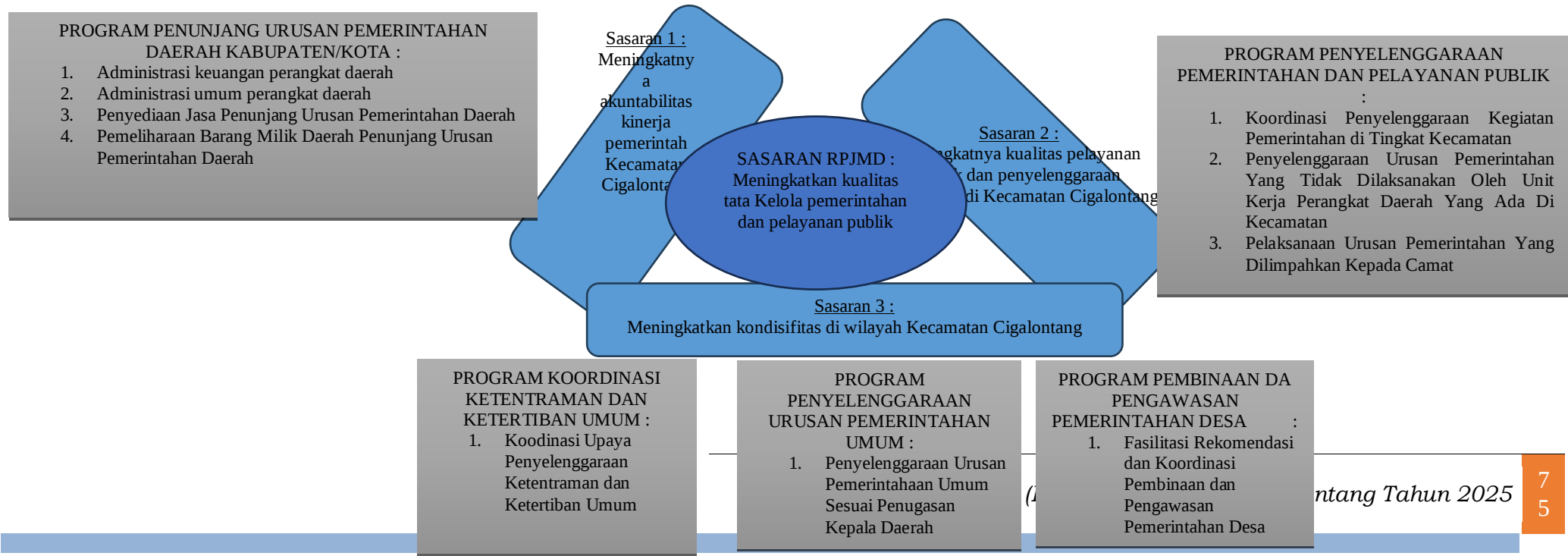
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ULMUM		
SASARAN		
S 1.	Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
IKI 1.	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
KEGIATAN		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.00 0.000

IKI 4.		Jumlah laporan hasil fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
KEGIATAN		
1	Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	215.000.000
3	Pelaksanaan Pemerintahan Yang Dilingpahkan Kepada Camat	25.530.000
4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.610.000

a. Cross cutting

Cross cutting kinerja Kecamatan Cigalontang dibuat bertujuan untuk membantu mengidentifikasi isu kinerja secara menyeluruh, membantu memahami lingkup pekerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target.

Tabel. 4.5
CROSS CUTTING KINERJA
KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2025



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Kecamatan Cigalontang.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Cigalontang akan dilaksanakan Tahun 2025, Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Cigalontang Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigalontang.

Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada awal Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan

Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Cigalontang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Cigalontang Tahun 2025. Kecamatan Cigalontang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cigalontang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Cigalontang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan

SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Cigalontang ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Cigalontang, Januari 2025

Camat Cigalontang



DEDI HERNIWAN, S.E.

Pembina Tk. I

NIP. 19681006 199503 1 004



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIGALONTANG
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIGALONTANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Cigalontang adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Cigalontang Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cigalontang pada Tahun 2025.

Cigalontang, 23 Juli 2025
Camat Cigalontang

DEDI HERNIWAN, S. E.
NP 34081006199503 1 004

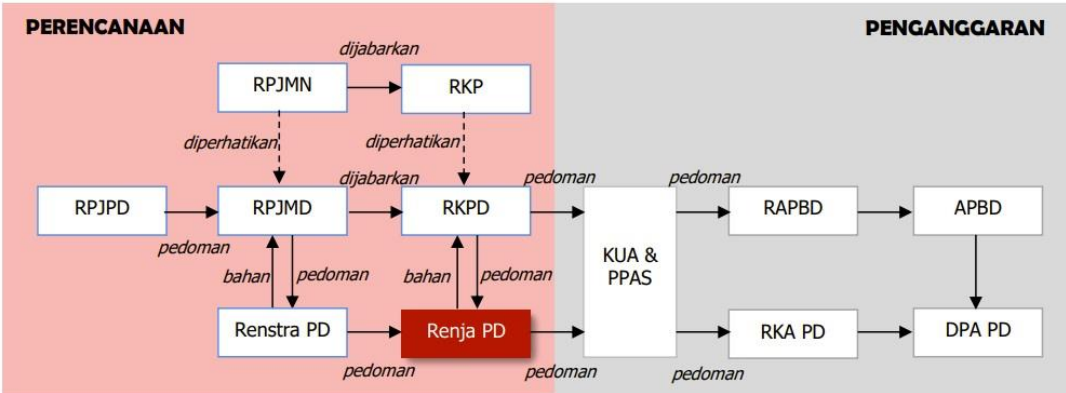
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
 BAB II 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2025.....	 11
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CIGALONTANG.....	 25
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CIGALONTANG	 26
 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG	 28
 BAB IV PENUTUP.....	 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target

kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Cigalontang, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cigalontang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Cigalontang.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigalontang sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Kecamatan Cigalontang Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;

2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;

Dengan demikian maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cigalontang menunjang program prioritas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun

- 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24); dan
20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Cigalontang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIGALONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
CIGALONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Cigalontang Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat salah satunya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cigalontang selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cigalontang Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cigalontang dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Cigalontang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Cigalontang untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.187.081.357,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Cigalontang selama Triwulan I masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Anggaran

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

No.	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)			
					TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III	TRIWULAN IV							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K				Rp.	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11=7+8+9+10		12=11/6*100	
		UNSUR WILAYAH						434,513,535		-				0.00	41,373,295		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	63	2,187,081,357		346,705,240						0.00	-	0.00	1.891712664
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	0	-						0	-	0	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	0	-						0	0	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	0	0	0	0						0	0	0	0

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0						25.00	-	0	0
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1,619,359,357	25.00	305,331,945						3	-	25.00	0.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1,619,359,357	3	305,331,945						0.00	-	25.00	0.00
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	%	100	-		-						0	0	0.00	0
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0						23.40	15,523,000	0	0

4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	%	100	77,460,000	23.40	15,523,000						3	4,764,000	23.40	20
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	37,000,000	3	4,764,000						3	2,009,000	25.00	12.87567568
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8,200,000	3	2,009,000								25.00	24.5
														2	2,385,000		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	9,600,000	2	2,385,000						3	6,365,000	20.00	24.84375
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	13	22,660,000	3	6,365,000						0.00	-	23.08	28.08914387
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	100	-		-						0	0	0.00	0

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	0						0	0	0	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	0						23.08	5,858,295	0	0
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	22,900,000	23.08	5,858,295						3	2,858,295	23.08	26
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13	14,500,000	3	2,858,295						3	3,000,000	23.08	19.71237931
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	8,400,000	3	3,000,000						26.09	19,992,000	23.08	35.71428571
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	85,842,000	26.09	19,992,000						3	17,569,000	26.09	23
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	13	75,646,000	3	17,569,000						0	0	23.08	23.2252862

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	0	0	0						0	0	0	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0						3	2,423,000	0	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10,196,000	3	2,423,000								30.00	23.76422126
														0.00	-		
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manonjaya	Poin		65,530,000.00		-						6.00	-	0	0

8		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Manonjaya	Dokumen	24	25,000,000.00	6.00	-						3	-	25.00	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	25,000,000	3	-						3	-	25.00	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	-	3							3.00	-	25.00	0

9		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	13	15,000,000	3.00	-						3	-	23.08	-
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	15,000,000	3	-						3.00	-	23.08	0
10		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	13	25,530,000.00	3.00	-						3	-	23.08	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	13	25,530,000	3	-						0.00	-	23.08	0
3	Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Pagerageung	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	100	-		-						0.00	-	0.00	0

11		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen		-	0.00	-						0	-	0	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	0	-	0	-						0	-	0	0
		Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	Desa	0	-	0	-						0.00	13,827,500	0	0
4	Meningkatnya Kondisifitas wilayah Kecamatan Pagerageung	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	254,325,000	0.00	13,827,500						0.00	13,827,500	0.00	5.436940922

12		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	12	254,325,000	0.00	13,827,500						0	-	0.00	5
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	-	0	-						0	13,827,500	0	0
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	254,325,000	0	13,827,500						0.00	-	0.00	5.436940922
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100	25,000,000		-						3	0	0.00	0

13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100	25,000,000	3	0							3	-	3.00	-
----	--	---	--	---	-----	------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	------	---

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	12	25,000,000	3	0							3	25.00	0
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	-	0	0							0	0.00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	-	0	0							0	0.00	-
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	36,665,000	25.00	73,980,795							25.00	25.00	201.77

14		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	36,665,000	25.00	73,980,795							25.00	25.00	202
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	17,610,000	3	0							3	25.00	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cigalontang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU / SPM / IKK / SDG's)	Satuan	Target		Realisasi dan Proyeksi Realisasi		Analisis Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	%	61	63	50,5	62,35	

	Singaparna						
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	poin	86,31	86,39	82,53	86,39	
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100	100	100	100	
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100	100	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Cigalontang tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Cigalontang masih dalam alur yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Walaupun masih terdapat indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Beberapa isu yang sering muncul antara lain: belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kualitas perencanaan, masalah keamanan dan ketertiban, serta belum efektifnya koordinasi antar instansi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cigalontang terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi.
- Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tahap identifikasi masalah, penyusunan tujuan, hingga penentuan prioritas program. .

- c. Memperkuat peran aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak criminal.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, baik secara formal maupun informal, serta memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui Pendidikan dan pelatihan,

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIGALONTANG TAHUN 2025

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan (sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program, kegiatan serta subkegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1 Tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Cigalontang merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cigalontang Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan

misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Cigalontang.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Perubahan Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumber Dana	Catatn Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPDP 2025					
KECAMATAN CIGALONTANG						2.187.081.357	2.176.778.857	DAU			2.549.285.556	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cigalontang	Kec Cigalontang	63 (B) Poin	63 (B) Poin	1.805.561.357	1.794.231.357	DAU		65 (B) Poin	1.877.765.556,40	Kec Cigalontang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	Kec Cigalontang	100%	100%	1.619.359.357	1.619.359.357,00	DAU		100%	1.659.810.324	Kec Cigalontang
	Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cigalontang	13 orang /bulan	13 orang /bulan	1.619.359.357	1.619.359.357	DAU		orang /bulan		Kec Cigalontang
	Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	100 %	77.460.000	77.460.000	DAU		100 %	108.460.000	Kec Cigalontang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec Cigalontang	12 Paket	12 Paket	37.000.000	37.000.000	DAU		12 Paket	68.000.000	Kec Cigalontang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Cigalontang	13 Paket	13 Paket	8.200.000	8.200.000	DAU		12 Paket	8.200.000	Kec Cigalontang
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cigalontang	10 Laporan	10 Laporan	9.600.000	9.600.000	DAU		10 Laporan	9.600.000	Kec Cigalontang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cigalontang	13 Laporan	13 Laporan	22.660.000	11.330.000	DAU		13 Laporan	22.660.000	Kec Cigalontang

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100%	100%	22.900.000	22.900.000	DAU		100%	22.900.000	Kec Cigalontang
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cigalontang	13 Laporan	13 Laporan	14.500.000	14.500.000	DAU		13 Laporan	14.500.000	Kec Cigalontang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cigalontang	13 Laporan	13 Laporan	8.400.000	8.400.000	DAU		13 Laporan	8.400.000	Kec Cigalontang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	85.842.000	85.842.000	DAU		100%	86.595.232	Kec Cigalontang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Cigalontang	13 Unit	13 Unit	75.646.000	75.646.000	DAU		9 Unit	75.646.000	Kec Cigalontang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Cigalontang	10 Unit	10 Unit	10.196.000	10.196.000	DAU		10 Unit	10.949.232	Kec Cigalontang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cigalontang		86,39	86,39	65.530.000	73.380.000	DAU		86,39	305.530.000	Kec Cigalontang
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	DAU		12 Laporan	265.000.000	Kec Cigalontang

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Cigalontang	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	21.250.000	DAU		12 Laporan	265.000.000	Kec Cigalontang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		13 laporan	13 laporan	15.000.000	15.000.000	DAU		13 laporan	15.000.000	Kec Cigalontang
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Cigalontang	13 laporan	13 laporan	15,000,000	15,000,000	DAU		13 laporan	15.000.000	Kec Cigalontang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	25.530.000	25.530.000	DAU		100%	25.530.000	Kec Cigalontang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Cigalontang	13 laporan	13 laporan	25.530.000	40.530.000	DAU		13 laporan	25.530.000	Kec Cigalontang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	254.325.000	254.325.000	DAU		100%	304.325.000	Kec Cigalontang
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi Upaya		12 laporan	12 laporan	254.325.000	254.325.000	DAU		12 laporan	304.325.000	Kec Cigalontang

	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Cigalontang	12 laporan	12 laporan	254.325.000	254.325.000	DAU		12 laporan	304.325.000	Kec Cigalontang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kec Cigalontang	100%	100%	25.000.000	24.050.000	DAU		100%	25.000.000	Kec Cigalontang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah		100%	100%	25,000,000	25,000,000	DAU		100%	25.000.000	Kec Cigalontang
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cigalontang	12 orang	12 orang	25,000,000	24,0500,000	DAU		12 orang	25.000.000	Kec Cigalontang

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan		100%	100%	36.665.000	30.792.500	DAU		100%	36.665.000	Kec Cigalontang
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh Pembinaan dan Pengawasan		100%	100%	36.665.000	30.792.500	DAU		100%	36.665.000	Kec Cigalontang
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cigalontang	12 Laporan	12 Laporan	17.610.000	11.875.000	DAU		12 Laporan	17.610.000	Kec Cigalontang
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Cigalontang	12 Laporan	12 Laporan	19.055.000	18.917.500	DAU		12 Laporan	19.055.000	Kec Cigalontang

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cigalontang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Cigalontang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Cigalontang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cigalontang ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cigalontang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Cigalontang, 23 Juli 2025
Camat Cigalontang

DEDI HERMIWAN, S. E.
NIP. 19681008199503 1 004